

**IMPLEMENTASI KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NO.540/20 TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI LPG  
TABUNG 3 KG**

**(Studi Kasus pada Agen dan Pangkalan Muslim di Kabupaten Tegal)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

**ILHAM JAYA KUSUMA**

**NIM. 1220043**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

**2025**

**IMPLEMENTASI KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NO.540/20 TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI LPG  
TABUNG 3 KG**

**(Studi Kasus pada Agen dan Pangkalan Muslim di Kabupaten Tegal)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

**ILHAM JAYA KUSUMA**

**NIM. 1220043**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

**2025**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ILHAM JAYA KUSUMA

NIM : 1220043

Judul Skripsi : Implementasi Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.540/20  
Tentang Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 Kg (Studi  
Kasus pada Agen dan Pangkalan Muslim di Kabupaten Tegal)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 27 Februari 2025  
Yang Menyatakan,



**ILHAM JAYA KUSUMA**

NIM.1220043

## NOTA PEMBIMBING

**Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.**

**Banvurip, RT 02 RW 05, Kec. Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan**

Lamp : 2 (dua) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdra Ilham Jaya Kusuma

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

*c.q* Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di-

PEKALONGAN

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Ilham Jaya Kusuma

NIM : 1220043

Judul Skripsi : Implementasi Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.540/20 Tentang Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 Kg (Studi Kasus pada Agen dan Pangkalan Muslim di Kabupaten Tegal)

Dengan ini mohon agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Pekalongan, 25 Februari 2025

Pembimbing



Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.  
NIP. 196503301991032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517

Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Ilham Jaya Kusuma

NIM : 1220043

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi: Implementasi Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.540/20 Tentang Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 Kg (Studi Kasus pada Agen dan Pangkalan Muslim di Kabupaten Tegal)

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

**Pembimbing**

**Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.**

NIP. 196503301991032001

**Dewan penguji**

**Penguji I**

**Tarmidzi, M.S.I.**

NIP. 1978002222023211006

**Penguji II**

**Kholil Said, M.H.I.**

NIP. 198604152019031005

Pekalongan, 10 Maret 2025

Disahkan oleh

**Dekan**



**Dr. Ahmad Jalaludin, M.A.**

NIP. 197306222000031001

## PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi-Nya yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW.

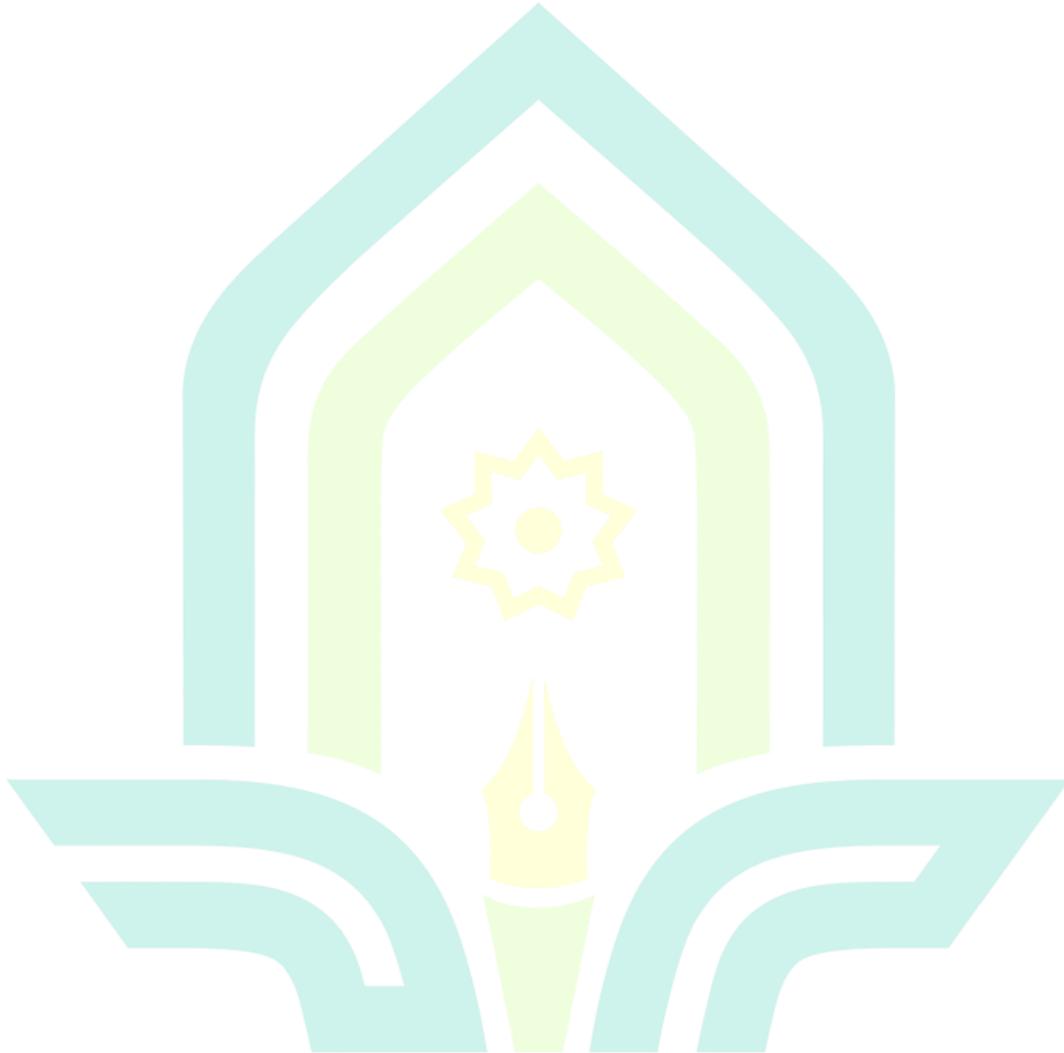
Dengan penuh rasa syukur, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahku, Ahmad Wajidi, yang telah bekerja keras untuk membiayai pendidikanku. Terima kasih atas segala pengorbanan dan dukungan yang tak pernah putus.
2. Ibuku, Ilatul Khikmah, sosok penuh kasih yang doanya selalu mengiringi setiap langkahku. Terima kasih atas cinta dan dukungan yang tiada henti.
3. Nenekku, Marfuah, yang selalu memberikan perhatian dan doa terbaiknya.
4. Kakakku, Liaul Khusni Wasikhatun Nur Khalimah, yang selalu mendukung dengan caranya sendiri.
5. Bude Khopsah, yang sudah seperti ibu kedua bagiku. Terima kasih atas perhatian dan kasih sayangnya.
6. Nisrin Humaida Annur, yang telah banyak membantu dalam menyusun skripsi ini, memberikan semangat, menemani, dan selalu mendukungku di setiap prosesnya. Terima kasih atas kesabaran dan ketulusannya.
7. Sahabat-sahabatku di Grup Calon Miliarder: Reza, Fikri, Teguh, Rozak, Romy, Ryan, Izzur, Ubaidilah, dan Marshel, yang telah menjadi teman seperjuangan sejak awal perkuliahan di Prodi HES. Terima kasih atas dukungan, kebersamaan, dan semangat yang selalu menemani dalam setiap langkah perjalanan ini.
8. Teman-teman kontrakan: Johar, Nasikhin, Yusuf, Dawam, Adib, dan Abyan, yang telah menjadi keluarga kedua dalam perjalanan ini.

## MOTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka.”  
(QS.Ar-Ra’d : 11)



## ABSTRAK

Kusuma, Ilham Jaya. 2025. *Implementasi Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.540/20 Tentang Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 Kg (Studi Kasus pada Agen dan Pangkalan Muslim di Kabupaten Tegal)*. Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.

Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 540/20 Tahun 2024 mengatur HET LPG 3 kg untuk memastikan distribusi subsidi yang tepat dan harga terkendali. Namun, implementasinya di Kabupaten Tegal menghadapi kendala, terutama harga LPG di pangkalan yang sering melebihi HET. Meskipun HET ditetapkan Rp 18.000, temuan di lapangan menunjukkan masyarakat membeli dengan harga Rp 24.000. Masalah yang dikaji dalam penelitian ini: (1) Bagaimana implementasi Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.540/20 Tahun 2024 tentang Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 Kg di Kabupaten Tegal? (2) Apa saja faktor yang mempengaruhi implementasi Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.540/20 Tahun 2024 tentang Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 Kg di Kabupaten Tegal?

Penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan observasi dan wawancara dengan 2 agen, 5 pangkalan, serta 2 konsumen LPG 3 kg di Kabupaten Tegal. Data sekunder berupa bahan hukum primer (Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 540/20 Tahun 2024), bahan hukum sekunder (sumber literatur), serta bahan hukum tersier (kamus dan ensiklopedi). Data dianalisis dengan teknik analisis kualitatif model interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 540/20 Tahun 2024 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 kg di Kabupaten Tegal belum sepenuhnya berjalan sesuai aturan. Meskipun di tingkat agen penjualan telah sesuai dengan HET sebesar Rp 15.520 per tabung dengan pengawasan melalui aplikasi Si Melon, audit tahunan, dan inspeksi mendadak, di tingkat pangkalan masih ditemukan pelanggaran. Beberapa pangkalan menjual LPG di atas HET, seperti Pangkalan Bu Tini dengan harga Rp 21.000–Rp 22.000 dan Pangkalan Harbas Rp 20.000. Pengawasan di pangkalan dilakukan melalui aplikasi MAP Lite serta monitoring bulanan oleh agen, namun sanksi seperti Surat Peringatan (SP) dan Pemutusan Hubungan Usaha (PHU) belum diterapkan secara tegas. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan ini meliputi kurangnya pengawasan distribusi LPG 3 kg, minimnya edukasi masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, dan struktur birokrasi distribusi yang kompleks.

**Kata Kunci :** LPG Tabung 3 Kg, HET, Keputusan Gubernur Jawa Tengah.

## **ABSTRACT**

Kusuma, Ilham Jaya. 2025. *Implementation of Central Java Governor Decree No.540/20 on the Highest Retail Price of 3 Kg LPG Tubes (Case Study on Muslim Agents and Bases in Tegal Regency)*. Thesis, Faculty of Sharia, Sharia Economic Law Study Program, Abdurrahman Wahid State Islamic University Pekalongan. Supervisor: Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.

*Central Java Governor Decree No. 540/20 of 2024 regulates the 3 kg LPG price ceiling to ensure proper distribution of subsidies and controlled prices. However, its implementation in Tegal Regency faces obstacles, especially the price of LPG at the base which often exceeds the HET. Although the price ceiling is set at IDR 18,000, findings in the field show that people buy at IDR 24,000. The problems studied in this research: (1) How is the implementation of Central Java Governor Decree No.540/20 of 2024 on the Highest Retail Price of 3 Kg LPG Tubes in Tegal Regency? (2) What are the factors that influence the implementation of Central Java Governor Decree No.540/20 of 2024 on the Highest Retail Price of 3 Kg LPG Tubes in Tegal Regency?*

*Empirical juridical research with a qualitative approach using primary and secondary data. Primary data was obtained by observation and interviews with 2 agents, 5 bases, and 2 consumers of 3 kg LPG in Tegal Regency. Secondary data were primary legal materials (Central Java Governor Decree No. 540/20 of 2024), secondary legal materials (literature sources), and tertiary legal materials (dictionaries and encyclopedias). The data were analyzed using qualitative analysis technique of interactive model.*

*The results showed that the implementation of the Central Java Governor Decree No. 540/20 of 2024 concerning the Highest Retail Price (HET) of 3 kg LPG Tubes in Tegal Regency has not fully implemented according to the rules. Although at the agent level sales were in accordance with the HET of Rp 15,520 per cylinder with supervision through the Si Melon application, annual audits, and unannounced inspections, at the base level violations were still found. Some bases sell LPG above the price ceiling, such as Bu Tini Base with a price of Rp 21,000-Rp 22,000 and Harbas Base at Rp 20,000. Supervision at the bases is carried out through the MAP Lite application and monthly monitoring by agents, but sanctions such as Warning Letters (SP) and Business Termination (PHU) have not been strictly implemented. Factors affecting the implementation of this policy include the lack of supervision of 3 kg LPG distribution, lack of public education, limited human resources, and complex bureaucratic structure of distribution.*

**Keywords:** 3 Kg LPG, HET, Central Java Governor Decree.

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Implementasi Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 540/20 Tahun 2024 tentang Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 Kg di Kabupaten Tegal.” Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, teladan bagi seluruh umat manusia. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Anindya Aryu Inayati, M.P.I, selaku sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Ibu Dra. Rita Rahmawati, M.Pd., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran dan dedikasi mengarahkan dan membimbing skripsi saya.
6. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh Civitas Akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membagikan ilmu yang sangat berharga selama

penulis menempuh pendidikan di Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

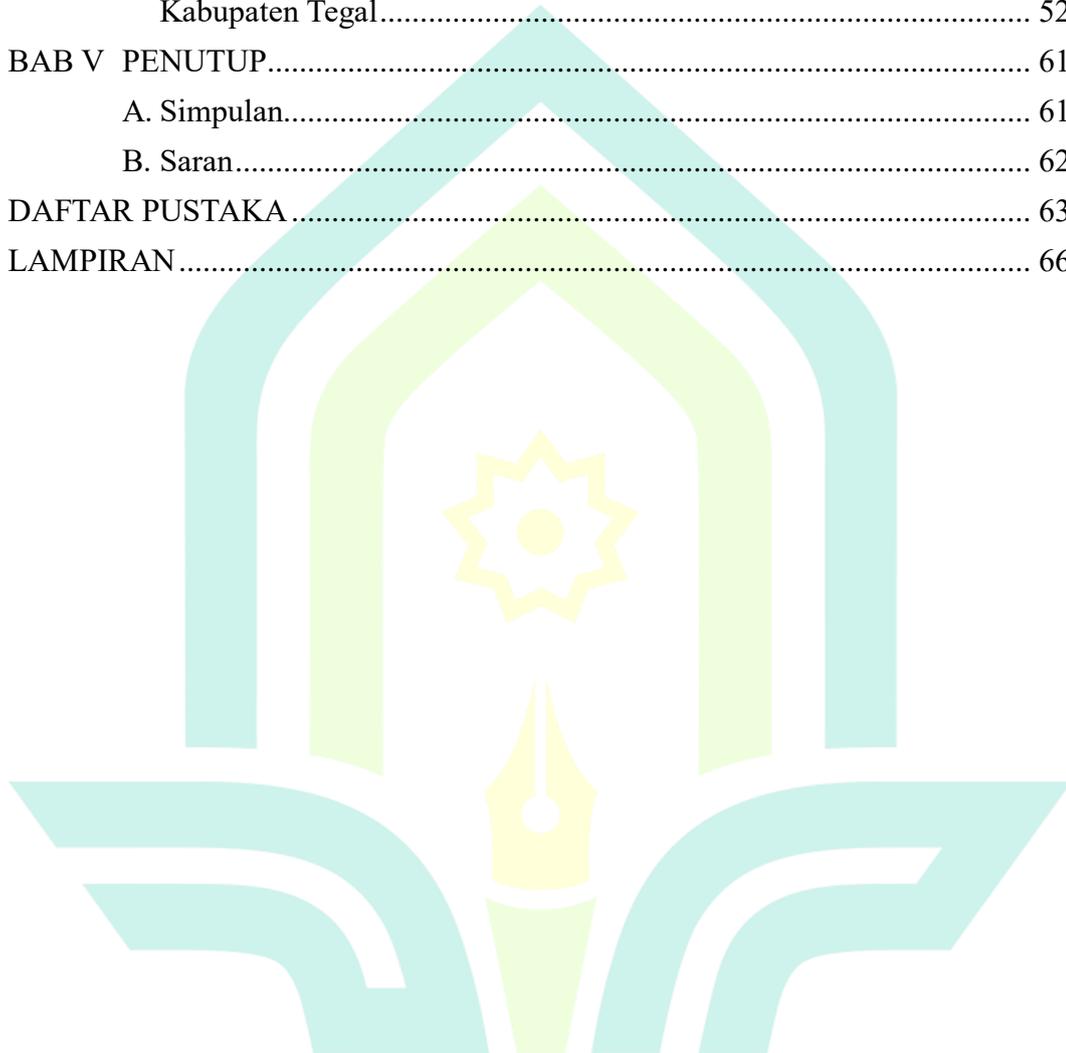
7. Para informan dari agen, pangkalan, dan konsumen LPG 3 Kg di Kabupaten Tegal yang telah memberikan banyak bantuan dalam pengumpulan data yang dibutuhkan oleh peneliti.
8. Orang tua dan keluarga yang senantiasa memberikan dukungan, baik secara material maupun moral.



## DAFTAR ISI

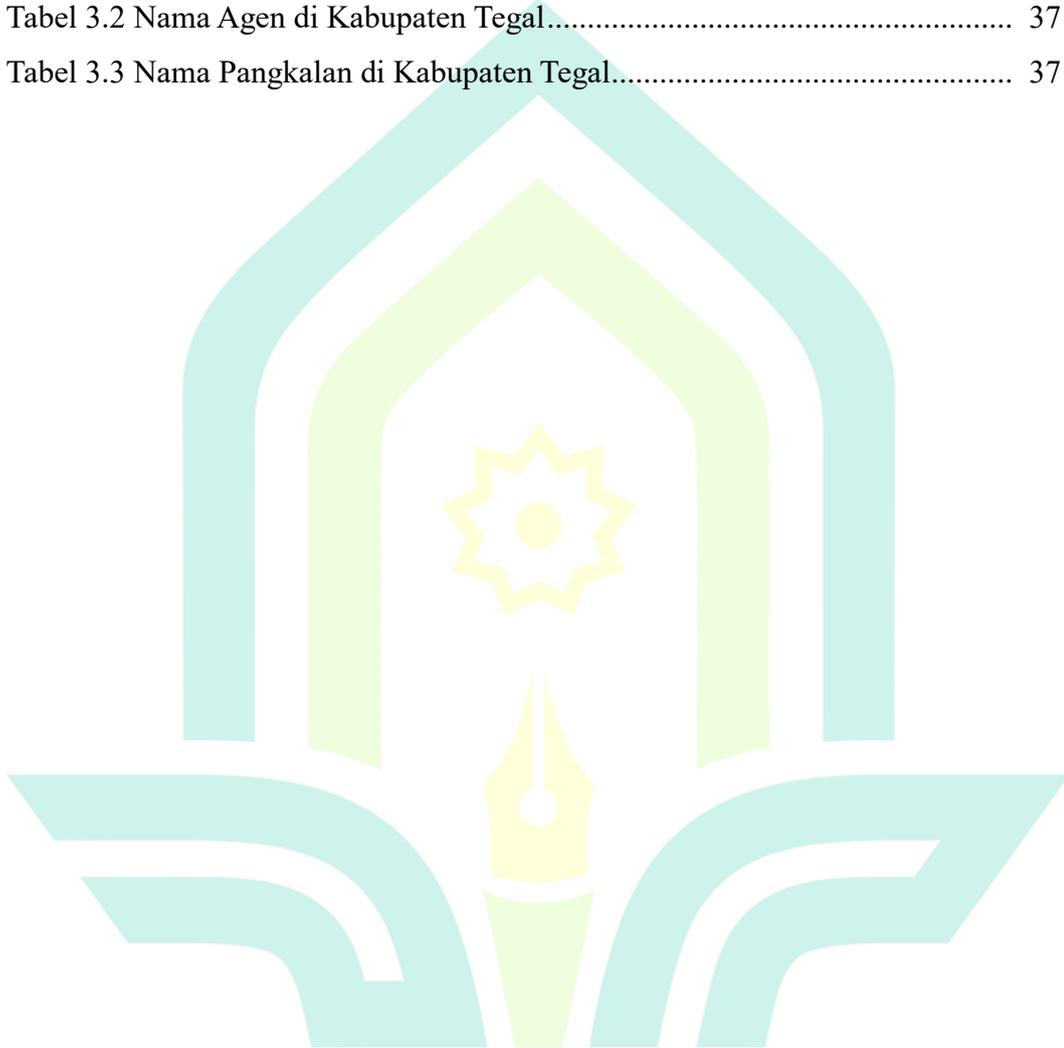
HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
MOTO .....	vi
ABSTRAK .....	vii
<i>ABSTRACT</i> .....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	4
E. Kerangka Teori.....	5
F. Penelitian yang Relevan .....	8
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TEORI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK DAN PENETAPAN HARGA .....	20
A. Implementasi Kebijakan Publik .....	20
B. Penetapan Harga Eceran Tertinggi LPG 3 Kg.....	29
C. Etika Bisnis Menurut Imam Al-Ghazali.....	31
BAB III IMPLEMENTASI KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NO.540/20 TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI LPG TABUNG 3 KG DI KABUPATEN TEGAL .....	35
A. Gambaran Umum Kabupaten Tegal .....	35
B. Implementasi Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.540/20 Tahun 2024 Tentang Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 Kg pada Agen dan Pangkalan Muslim di Kabupaten Tegal.....	37
C. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.540/20 Tahun 2024 Tentang Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 Kg pada Agen dan Pangkalan Muslim di Kabupaten Tegal.....	43

BAB IV IMPLEMENTASI KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NO.540/20 TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI LPG TABUNG 3 KG DI KABUPATEN TEGAL .....	49
A. Analisis Implementasi Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.540/20 Tentang Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 Kg pada Agen dan Pangkalan Muslim di Kabupaten Tegal.....	49
B. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.540/20 Tahun 2024 Tentang Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 Kg pada Agen dan Pangkalan Muslim di Kabupaten Tegal.....	52
BAB V PENUTUP.....	61
A. Simpulan.....	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN.....	66



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perhitungan HET LPG 3 kg dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 540/20 Tahun 2024 .....	7
Tabel 2.1 Perhitungan HET LPG 3 kg dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 540/20 Tahun 2024 .....	29
Tabel 3.1 Jumlah Penduduk di Kabupaten Tegal .....	36
Tabel 3.2 Nama Agen di Kabupaten Tegal.....	37
Tabel 3.3 Nama Pangkalan di Kabupaten Tegal.....	37



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Elpiji adalah istilah yang digunakan untuk produk LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) yang dipasarkan oleh Pertamina. LPG adalah gas hidrokarbon yang dihasilkan dari proses kilang minyak dan gas, dan dicairkan dengan menggunakan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, serta penanganannya. Komposisi utama LPG terdiri dari propane ( $C_3H_8$ ), butane ( $C_4H_{10}$ ), atau campuran dari kedua senyawa tersebut.<sup>1</sup> Permintaan akan gas LPG 3 kg terus naik setiap tahun seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan ekonomi. Bahan bakar LPG tabung 3 kg ini merupakan kebutuhan utama bagi banyak orang, khususnya bagi masyarakat dengan ekonomi kurang mampu, karena termasuk dalam kategori barang subsidi pemerintah yang disalurkan melalui PT Pertamina.<sup>2</sup>

PT Pertamina Persero bertanggung jawab untuk mendistribusikan gas LPG, mulai dari Pertamina sebagai produsen, kemudian disalurkan ke Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE), agen, hingga pangkalan LPG di berbagai daerah. Sistem ini diatur sedemikian rupa guna memastikan bahwa LPG 3 Kg dapat tersedia dengan harga yang sesuai di setiap wilayah. Namun untuk menjaga kestabilan harga hingga ke konsumen, maka

---

<sup>1</sup> Reza Faizal Idris and Heru Sulistiyantoro, "Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Dalam Transaksi Jual Beli Gas Lpg 3 Kilogram Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa* 1, no. 3 (2022): 227–46.

<sup>2</sup> Siti Hajar and Nuraini, "Analisis Kepatuhan Pemilik Pangkalan LPG PT Kuta Naga Ga Terhadap HET Yang Telah Ditetapkan Pemerintah Dalam Penjualan Gas Subsidi Aceh Selatan," *Jurnal Serambi Ekonomi Dan Bisnis* 1, no. 2 (2024): 283–94.

diperlukan regulasi yang jelas termasuk penetapan harga eceran tertinggi oleh pemerintah.<sup>3</sup> Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2021, yang mengubah Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*. Pasal 24A ayat 1 berbunyi, “Pemerintah daerah provinsi bersama dengan pemerintah daerah kabupaten/kota menetapkan harga eceran tertinggi LPG tertentu untuk pengguna LPG tertentu pada titik serah di sub penyalur LPG tertentu dengan memperhatikan kondisi daerah, daya beli masyarakat, margin yang wajar, sarana dan fasilitas penyediaan dan pendistribusian LPG tertentu.”<sup>4</sup>

Harga Eceran Tertinggi (HET) menetapkan batas harga maksimum yang wajib ditaati oleh produsen demi menjamin perlindungan bagi konsumen dengan memastikan harga tetap terjangkau. Penetapan HET merupakan langkah negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui harga yang adil. Selain itu, pemerintah juga menentukan harga minimum sebagai upaya perlindungan terhadap pelaku usaha yang bekerja sama dengan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pasar dan mencegah persaingan yang tidak sehat.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Fitri Suryani, Arif Rahman, and Fatahillah Fatahillah, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Gas Elpiji Bersubsidi Melebihi Harga Eceran Tertinggi,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 6, no. 2 (2023): 122, <https://doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.9243>.

<sup>4</sup> Kementerian ESDM, *Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan Dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas.*, 2021.

<sup>5</sup> Mhd Erwin Munthe, “Kemaslahatan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dan Pelaku Usaha Melalui Mekanisme Penetapan Harga Oleh Negara,” *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah* 9, no. 2 (2018): 217–43.

Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 540/20 adalah salah satu regulasi yang mengatur HET LPG 3 kg di wilayah Jawa Tengah, termasuk Kabupaten Tegal. Keputusan ini bertujuan untuk memastikan bahwa distribusi LPG subsidi berjalan sesuai peruntukannya, harga LPG tetap terkendali, dan masyarakat dapat menikmati subsidi yang diberikan pemerintah. Dalam keputusan ini, ditetapkan besaran HET yang berlaku untuk semua kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Pelaksanaan Keputusan Gubernur tersebut di Kabupaten Tegal menghadapi sejumlah permasalahan. Salah satu permasalahan yang marak terjadi adalah harga jual LPG di tingkat pangkalan yang sering kali melebihi HET yang telah ditetapkan. Harga eceran tertinggi yang seharusnya diterima oleh masyarakat menurut Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.540/20 Tahun 2024 sebesar Rp 18.000. Namun, berdasarkan temuan di lapangan, masyarakat harus membeli LPG 3 kg dengan harga sebesar Rp 24.000, jauh di atas HET yang berlaku.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi keputusan gubernur Jawa Tengah No.540/20 tahun 2024 tentang harga eceran tertinggi LPG Tabung 3 kg di Kabupaten Tegal dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti menarik sebuah judul **“Implementasi Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.540/20 Tentang Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 Kg (Studi Kasus pada Agen dan Pangkalan Muslim di Kabupaten Tegal)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, yang diangkat menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi keputusan gubernur Jawa Tengah No.540/20 tahun 2024 tentang Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 Kg pada agen dan pangkalan muslim di Kabupaten Tegal?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi implementasi keputusan gubernur Jawa Tengah no.540/20 tahun 2024 tentang Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 Kg pada agen dan pangkalan muslim di Kabupaten Tegal?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dari penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Untuk mendeskripsikan Implementasi Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.540/20 Tahun 2024 Tentang Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 Kg pada agen dan pangkalan muslim di Kabupaten Tegal.
2. Untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi Implementasi Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.540/20 Tahun 2024 tentang Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 Kg pada agen dan pangkalan muslim di Kabupaten Tegal.

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoretis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu di bidang Hukum Ekonomi Syariah, terutama terkait dengan pelaksanaan Surat Keputusan

Gubernur Jawa Tengah Nomor 540/20 Tahun 2024 tentang harga eceran tertinggi LPG tabung 3 kg.

## 2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang lebih efektif dalam distribusi LPG tabung 3 kg.

## E. Kerangka Teori

### 1. Teori Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan mencakup bagaimana para pelaku kebijakan melaksanakan keputusan yang telah diambil. Semua langkah yang diambil oleh pemangku kepentingan bertujuan untuk mencapai hasil yang diinginkan dari kebijakan tersebut.<sup>6</sup> Menurut George C. Edward III dalam Andi Asmawati bahwa pelaksanaan suatu kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, serta sistem birokrasi yang diterapkan.<sup>7</sup>

### 2. Harga Eceran Tertinggi

Harga Eceran Tertinggi (HET) menetapkan batas harga maksimum yang wajib ditaati oleh produsen demi menjamin perlindungan bagi konsumen dengan memastikan harga tetap terjangkau. Penetapan HET merupakan langkah negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui harga yang adil. Selain itu, pemerintah juga menentukan harga

---

<sup>6</sup> Erma Fatmawati, "Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Peran Birokrasi Dan Partisipasi Masyarakat," *JIEMAN: Journal of Islamic Educational Management* 1, no. 1 (2019): 58–76, <https://doi.org/10.35719/jieman.v1i1.10>.

<sup>7</sup> Andi Asmawati, "Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Disiplin Aparatur Sipil Negara Pada Kantor Kelurahan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang," *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan* 8, no. 1 (2020): 8–17, <https://doi.org/10.51817/prj.v8i1.201>.

minimum sebagai upaya perlindungan terhadap pelaku usaha yang bekerja sama dengan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pasar dan mencegah persaingan yang tidak sehat.<sup>8</sup>

### 3. Regulasi Harga Eceran Tertinggi

Pertamina sebagai pelaksana utama dalam pengadaan dan penyaluran gas LPG tabung 3 kg, telah merancang sistem distribusi yang mampu mencapai semua lapisan masyarakat. Sistem penyaluran ini dimulai dari SPBE (Stasiun Pengisian Bulk Elpiji), yang berfungsi sebagai fasilitas pengisian ulang gas LPG dan menjadi tempat utama bagi pengadaan gas tersebut. Setelah itu, gas LPG didistribusikan melalui agen yang berperan sebagai pemasok utama yang memiliki tanggung jawab untuk mendistribusikan gas ke berbagai wilayah. Terakhir, gas LPG sampai ke sub agen atau pangkalan yang berperan sebagai ujung tombak dalam penyaluran ke konsumen akhir, memastikan ketersediaan gas LPG 3 kg hingga ke tingkat rumah tangga atau pengguna akhir.<sup>9</sup>

Gubernur Jawa Tengah mengeluarkan Keputusan Gubernur No. 540/20 Tahun 2024 yang menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG tabung 3 kg pada titik serah sub penyalur/pangkalan di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Perhitungan harga eceran tertinggi LPG 3 Kg sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 540/20 Tahun 2024 yaitu sebagaimana tabel di bawah ini:

---

<sup>8</sup> Munthe, "Kemaslahatan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dan Pelaku Usaha Melalui Mekanisme Penetapan Harga Oleh Negara."

<sup>9</sup> Saladdinwirawan Effendy, "Analisis Saluran Distribusi Gas Elpiji 3 Kg Serta Dampaknya Terhadap Harga Pada Tingkat Konsumen Akhir ( Studi Kasus Kota Palembang )," *Sustainable Competitive Advantage-7 (Sca-7) Feb Unsoed* 7, no. September (2017): 40–48, [http://jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/sca-1/article/viewFile/1040/pdf\\_213](http://jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/sca-1/article/viewFile/1040/pdf_213).

Tabel 1.1 Perhitungan HET LPG 3 kg dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 540/20 Tahun 2024

a. Harga ex Pertamina (SPPBE/SPBE) termasuk PPN	Rp11.584,00
b. Margin Agen	Rp1.166,00
c. Harga Jual Eceran (HJE)	Rp12.750,00
d. Biaya Operasional Agen (Kenaikan BBM, UMR dan Spare Part)	Rp2.770,00
e. Harga Jual Agen ke Pangkalan	Rp15.520,00
f. Margin Pangkalan	Rp2.480,00
g. HET di Pangkalan	Rp18.000,00

Sumber: SK Gubernur Jawa Tengah No. 540/20 Tahun 2024

Selain perhitungan harga di atas, Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 540/20 Tahun 2024 juga menyebutkan bahwa HET untuk LPG tabung 3 kg di pangkalan adalah harga yang seharusnya dibayarkan ketika sampai di tangan konsumen, dan setiap penjualan LPG tabung 3 kg di atas HET akan dikenakan sanksi hingga pemberhentian hubungan usaha. Hiswana Migas Dewan Pimpinan Daerah IV Jawa Tengah dan Yogyakarta berkomitmen menjaga stabilitas HET ini; Jika sebuah pangkalan menyalahi aturan yang telah diputuskan, maka akan dijatuhkan hukuman sesuai dengan ketentuan hukum serta perjanjian kontrak yang berlaku. Untuk daerah dengan kondisi geografis khusus yang memerlukan transportasi tambahan, Gubernur dapat menetapkan komponen tambahan HET sebagai kompensasi biaya angkut setelah dilakukan kajian oleh Bupati/Wali Kota. Selain itu, Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan

Terpadu di bawah koordinasi Sekretariat Daerah, yang bertugas mengawasi pelaksanaan HET di wilayah masing-masing.<sup>10</sup>

## F. Penelitian yang Relevan

*Pertama*, penelitian yang ditulis oleh Latifah dengan judul “Implementasi Distribusi LPG 3 Kg untuk Masyarakat Miskin pada Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong” pada Tahun 2024. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pelaksanaan distribusi gas LPG 3 kg untuk masyarakat miskin masih belum optimal karena susahnya pengendalian akibat perbedaan pengetahuan dan jumlah penerima di tiap desa. Kurangnya sistematisasi dalam kebijakan, seperti ketiadaan data penerima yang jelas dan distribusi yang tidak teratur, memperburuk masalah. Selain itu, sub agen sering menjual gas kepada keluarga atau pengecer demi keuntungan lebih. Faktor penghambatnya adalah kurangnya SDM, koordinasi pemerintah, dan kesadaran masyarakat, sedangkan faktor pendukungnya adalah SDM yang memadai dan koordinasi yang baik. Implikasinya, implementasi bisa lebih efektif dengan penambahan SDM, pengawasan berkala, dan sanksi tegas bagi pelanggar.<sup>11</sup>

Persamaan dalam penelitian di atas terdapat pada pendekatan yang digunakan yakni menggunakan pendekatan kualitatif dan sama-sama membahas implementasi regulasi tentang distribusi LPG 3 kg.

---

<sup>10</sup> Gubernur Jawa Tengah, *Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 540/20 Tahun 2024 Tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg Pada Titik Serah Sub Penyalur/Pangkalan*, 2024.

<sup>11</sup> Latifah, “Implementasi Distribusi Gas Lpg 3 Kg Untuk Masyarakat Miskin Pada Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong,” *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 3, no. 5 (2024): 2572–84, <https://doi.org/10.55681/sentri.v3i5.2843>.

Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, yaitu meskipun sama-sama membahas terkait LPG 3 kg, namun penelitian di atas difokuskan pada Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang penyediaan, pendistribusian gas serta Surat Edaran Gubernur Kalimantan Selatan No 541/0030/EKO tentang penggunaan tabung gas LPG 3 kg. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti berfokus pada Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.540/20 Tahun 2024 tentang Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 Kg.

*Kedua*, penelitian yang ditulis oleh Avilia Fidiyaningsih dengan judul “Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 541/15 tahun 2015 tentang penetapan harga jual LPG tabung 3 kg di Kota Semarang.” Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 541/15 Tahun 2015, harga eceran tertinggi LPG 3 kg di tingkat pangkalan diputuskan sebesar Rp 15.500 per tabung. Namun, ditemukan adanya kebijakan harga yang ditetapkan sepihak oleh pangkalan tanpa pemberitahuan kepada konsumen. Praktik ini menyalahi hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 4 huruf (c) dan (g).<sup>12</sup>

Persamaan dalam penelitian ini terdapat pada pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan kualitatif, serta topik yang dibahas, yakni distribusi LPG 3 kg. Namun, terdapat perbedaan dalam aspek yang dikaji.

---

<sup>12</sup> Avilia Fiddiyaningsih, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 541/15 Tahun 2015 Tentang Penetapan Harga Jual LPG Tabung 3 Kg Di Kota Semarang” (UIN WaliSongo, 2017).

Meskipun sama-sama meneliti distribusi LPG 3 kg, penelitian ini menyoroti aspek hukum Islam, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih berfokus pada Implementasi Keputusan Gubernur No. 540/20 Tahun 2024 mengenai penetapan harga LPG tabung 3 kg.

*Ketiga*, penelitian yang ditulis oleh Rizqa Maulida dengan judul “Analisis Implementasi Peraturan Pemerintah tentang Pendistribusian, dan Penetapan Harga Lpg 3 Kg bagi Distributor LPG 3 Kg dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh)” pada tahun 2021. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa secara keseluruhan belum sepenuhnya sesuai dengan Ekonomi Islam dikarenakan adanya beberapa pihak pangkalan yang melakukan kecurangan seperti menjual di atas harga HET, menjual gas LPG 3 kg kepada yang tidak berhak menerimanya. Sedangkan dalam ekonomi Islam sendiri melakukan transaksi namun merugikan pihak lain dan mengambil hak milik orang lain merupakan perbuatan yang di larang. Salah satu pangkalan juga masih melakukan penimbunan terhadap gas LPG 3 kg.<sup>13</sup>

Persamaan dalam penelitian ini terdapat pada pendekatan yang digunakan yakni menggunakan pendekatan kualitatif dan sama-sama membahas implementasi regulasi tentang distribusi LPG 3 kg. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, yaitu meskipun sama-sama membahas terkait implementasi regulasi tentang distribusi LPG 3 kg, namun penelitian di atas berfokus pada analisis berdasarkan perspektif

---

<sup>13</sup> Rizqa Maulida, “Analisis Implementasi Peraturan Pemerintah Tentang Pendistribusian, dan Penetapan Harga Lpg 3 Kg Bagi Distributor LPG 3 Kg Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh)” (UIN Arraniry Banda Aceh, 2021).

ekonomi islam, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti berfokus pada Implementasi Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.540/20 Tahun 2024 tentang Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 Kg.

*Keempat*, penelitian ini di tulis oleh Dini Andini dengan judul “Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia No.104 Tahun 2007 Pasal 3 Ayat (1) Tentang Pendistribusian Gas Tabung 3 Kg (Studi di Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal)” pada Tahun 2023. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 104 tahun 2007 pasal 3 ayat 1 tentang pendistribusian gas tabung 3 kg (Studi di Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal) belum terimplementasikan secara optimal di lapangan. Hal ini disebabkan karena pangkalan menjual secara bebas gas LPG 3 kg kepada masyarakat. Akibatnya penerima gas LPG 3 kg subsidi menjadi tidak tepat sasaran. Kemudian faktor penghambatnya yaitu ketidaksesuaian standar dan sasaran kebijakan, sumber daya manusia yang belum memadai, kurangnya koordinasi pemerintah dengan masyarakat, kurangnya pengawasan langsung dari Pertamina ke pangkalan.<sup>14</sup>

Persamaan dalam penelitian ini terdapat pada pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan kualitatif, serta sama-sama membahas implementasi regulasi terkait distribusi LPG 3 kg. Namun, perbedaannya terletak pada fokus kajian. Meskipun keduanya membahas LPG 3 kg, penelitian sebelumnya menitikberatkan pada Implementasi Peraturan

---

<sup>14</sup> Dini Andini, “Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia No.104 Tahun 2007 Pasal 3 Ayat (1) Tentang Pendistribusian Gas Tabung 3 Kg (Studi Di Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal)” (UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, 2023).

Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Pasal 3 Ayat 1 mengenai pendistribusian LPG 3 kg, sementara penelitian yang dilakukan saat ini lebih berfokus pada Implementasi Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 540/20 Tahun 2024 tentang Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 kg.

*Kelima*, penelitian yang ditulis oleh Rafika Norjanah, Ni Made Musiyani Anjasmari, dan Moh. Fajar Noorrahman dengan judul “Implementasi Kebijakan Distribusi Gas LPG 3 Kilogram di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan (Studi Kasus pada Pangkalan di Desa Batu Merah dan Kusambi Hilir)” pada tahun 2024. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Implementasi Kebijakan Distribusi Gas LPG 3 kg di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan (Studi Kasus pada Pangkalan di Desa Batu Merah dan Kusambi Hilir) kurang baik. Dilihat dari beberapa indikator yakni : transmisi/penyaluran komunikasi kurang baik, kejelasan informasi kurang baik, konsistensi cukup baik, staf cukup baik, informasi kurang baik, wewenang cukup baik, fasilitas cukup baik, pengangkatan birokrasi cukup baik, insentif kurang baik, *Standar Operatting Procedures* (SOP) kurang baik, fragmentasi/tanggung jawab kurang baik. Faktor penghambat yaitu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat. Faktor pendukung yaitu adanya koordinasi antar badan pelaksana berjalan dengan baik.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Rafika Norjanah et al., “Implementasi Kebijakan Distribusi Gas Lpg 3 Kilogram Di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan (Studi Kasus Pada Pangkalan Di Desa Batu Merah Dan Kusambi Hilir),” *Jurnal Kebijakan Publik* 1, no. 4 (2024): 846–57.

Persamaan dalam penelitian ini terletak pada pendekatan yang digunakan yakni menggunakan pendekatan kualitatif dan sama-sama membahas implementasi regulasi tentang distribusi LPG 3 kg. Sedangkan perbedaannya terletak pada teknik pengambilan sampel, di mana penelitian di atas menggunakan teknik *purposive sampling* sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan teknik *cluster sampling* dan *accidental sampling*.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yakni suatu metode penelitian yang menitikberatkan pada pengamatan langsung terhadap kondisi nyata di masyarakat. Jenis penelitian ini bertujuan untuk menelaah fakta-fakta yang berhubungan dengan isu yang diteliti, sehingga dapat memberikan gambaran konkret mengenai bagaimana hukum dijalankan dalam kehidupan masyarakat.<sup>16</sup> Oleh karena itu, sesuai dengan jenis penelitian ini, peneliti akan mengkaji implementasi Keputusan Gubernur Jawa Tengah no.540/20 tentang harga eceran tertinggi LPG tabung 3 kg pada agen dan pangkalan muslim di Kabupaten Tegal

### 2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk menjelajahi berbagai fakta secara mendalam

---

<sup>16</sup> Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 145–60, <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>.

dengan pendekatan ilmiah terhadap individu atau kelompok guna memahami dan menjelaskan hal-hal yang melatarbelakangi suatu fenomena.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini, pendekatan tersebut diterapkan untuk memperoleh data-data informasi berupa uraian, ungkapan, dan kata-kata verbal dari para informan terkait dengan implementasi keputusan gubernur no.540/20 tentang harga eceran tertinggi LPG tabung 3 kg pada agen dan pangkalan muslim di Kabupaten Tegal.

### 3. Sumber Data

#### a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang didapat tanpa perantara atau secara langsung oleh peneliti dari sumber atau objek yang sedang diteliti.<sup>18</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung dengan 2 agen, 5 pangkalan dan 2 konsumen LPG 3 kg di Kabupaten Tegal.

#### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat oleh peneliti dengan melalui perantara atau secara tidak langsung dari objek penelitian, melainkan melalui sumber lain, baik verbal maupun tertulis. Sumber data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

---

<sup>17</sup> Sigit Supto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani, *Metodologi Riset Hukum* (Surakarta: Oase Pustaka, 2020).

<sup>18</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: Qiara Media, 2021).

- 1) Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.540/20 tentang harga eceran tertinggi LPG tabung 3 kg.
- 2) Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup buku, artikel, dan sumber literatur lainnya yang berkaitan dengan teori implementasi kebijakan.
- 3) Bahan hukum tersier berupa kamus, ensiklopedi, dan sebagainya.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

##### a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung oleh peneliti, yang memungkinkan pemahaman lebih mendalam tentang konteks data dalam kondisi sosial secara keseluruhan, sehingga menghasilkan pemahaman yang menyeluruh. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung praktik distribusi LPG 3 kg di Kabupaten Tegal yang meliputi Agen 1 di Adiwerna, Agen 2 di Slawi, Pangkalan 1 di Warureja, Pangkalan 2 dan 3 di Dukuhwaru, dan Pangkalan 4 dan 5 di Balapulang.

##### b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi verbal melalui tanya jawab dan interaksi langsung dengan individu yang dapat memaparkan informasi kepada

peneliti.<sup>19</sup> Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan agen, pangkalan, dan konsumen yang terlibat dalam praktik distribusi LPG 3 Kg di Kabupaten Tegal. Agen dan pangkalan dipilih menggunakan teknik *cluster sampling*, sedangkan konsumen dipilih melalui teknik *accidental sampling*. *Cluster sampling* merupakan teknik pengampilan sampel di mana populasi dibagi menjadi beberapa kelompok atau klaster. Setelah itu, beberapa klaster dipilih secara acak, dan seluruh anggota dalam klaster yang terpilih digunakan sebagai sampel akhir.<sup>20</sup> *Accidental sampling* merupakan metode penentuan sampel berdasarkan kebetulan, di mana individu yang secara tidak sengaja ditemui dapat dijadikan sampel jika dianggap relevan sebagai sumber data.<sup>21</sup>

### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan meneliti berbagai sumber tertulis, seperti literatur, laporan resmi, notulen pertemuan, jurnal harian, serta dokumen lainnya yang memuat informasi atau data yang dibutuhkan dalam penelitian.<sup>22</sup> Dokumentasi dalam penelitian ini mencakup buku-buku, jurnal, dan dokumen lain yang relevan dengan implementasi

---

<sup>19</sup> Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum* (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022).

<sup>20</sup> Deri Firmansyah and Dede, "Teknik Pengambilan Sampel Umum Dalam Metodologi," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH)* 1, no. 2 (2022): 85–114.

<sup>21</sup> Rakhmad Pribowo Hari Putra, Sarjon Defit, and Sumijan, "Analisis Sistem Antrian Dalam Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Menggunakan Metode Accidental Sampling," *Jurnal Sistik Informasi Dan Teknologi* 4, no. 2 (2022): 70–75, <https://doi.org/10.37034/jsisfotek.v4i2.127>.

<sup>22</sup> Rifa'I Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta, 2021).

keputusan Gubernur Jawa Tengah No.540/20 Tahun 2024 tentang harga eceran tertinggi LPG tabung 3 kg.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses menguraikan informasi menjadi komponen-komponen terkecil dan menelaah hubungan antar komponen tersebut dalam konteks keseluruhan dari berbagai sudut pandang. Penelaahan ini dilakukan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>23</sup> Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif model interaktif dari Miles dan Huberman. Teknik analisis data Miles dan Huberman melibatkan tiga langkah utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.<sup>24</sup>

### a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses penyederhanaan informasi dengan menyaring bagian-bagian yang paling relevan, merangkum inti dari data yang diperoleh, serta mengidentifikasi pola dan tema utama. Langkah ini membantu peneliti dalam mengorganisir data secara lebih terstruktur, sehingga memudahkan proses analisis, pengumpulan data lanjutan, serta penelusuran informasi jika dibutuhkan.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini, reduksi data melibatkan pemilahan informasi yang relevan dengan tinjauan keputusan gubernur No.540/20 tentang harga eceran tertinggi LPG tabung 3 kg di Kabupaten Tegal.

---

<sup>23</sup> Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*.

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2019).

<sup>25</sup> Sugiyono.

#### b. Penyajian Data

Penyajian data membantu peneliti memahami situasi yang terjadi karena data telah terorganisir dengan baik. Penyajian data dapat berupa teks naratif, bagan, tabel, dan format lainnya.<sup>26</sup> Penyajian data dalam penelitian ini menggunakan bentuk teks naratif untuk mempermudah pemahaman hasil penelitian Implementasi keputusan gubernur No.540/20 tentang harga eceran tertinggi LPG tabung 3 kg pada agen dan pangkalan muslim di Kabupaten Tegal.

#### c. Penarikan Kesimpulan

Data yang telah melalui tahap penyajian dapat disimpulkan menjadi jawaban atas rumusan masalah, asalkan didukung dengan bukti yang kuat.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini, kesimpulan yang diambil akan berkaitan dengan keputusan gubernur No.540/20 tentang harga eceran tertinggi LPG tabung 3 kg, khususnya terkait praktik jual beli LPG 3 kg pada agen dan pangkalan muslim di Kabupaten Tegal.

### **H. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini akan disusun dengan beberapa bab untuk memudahkan penulisan, dengan sistematika sebagai berikut.

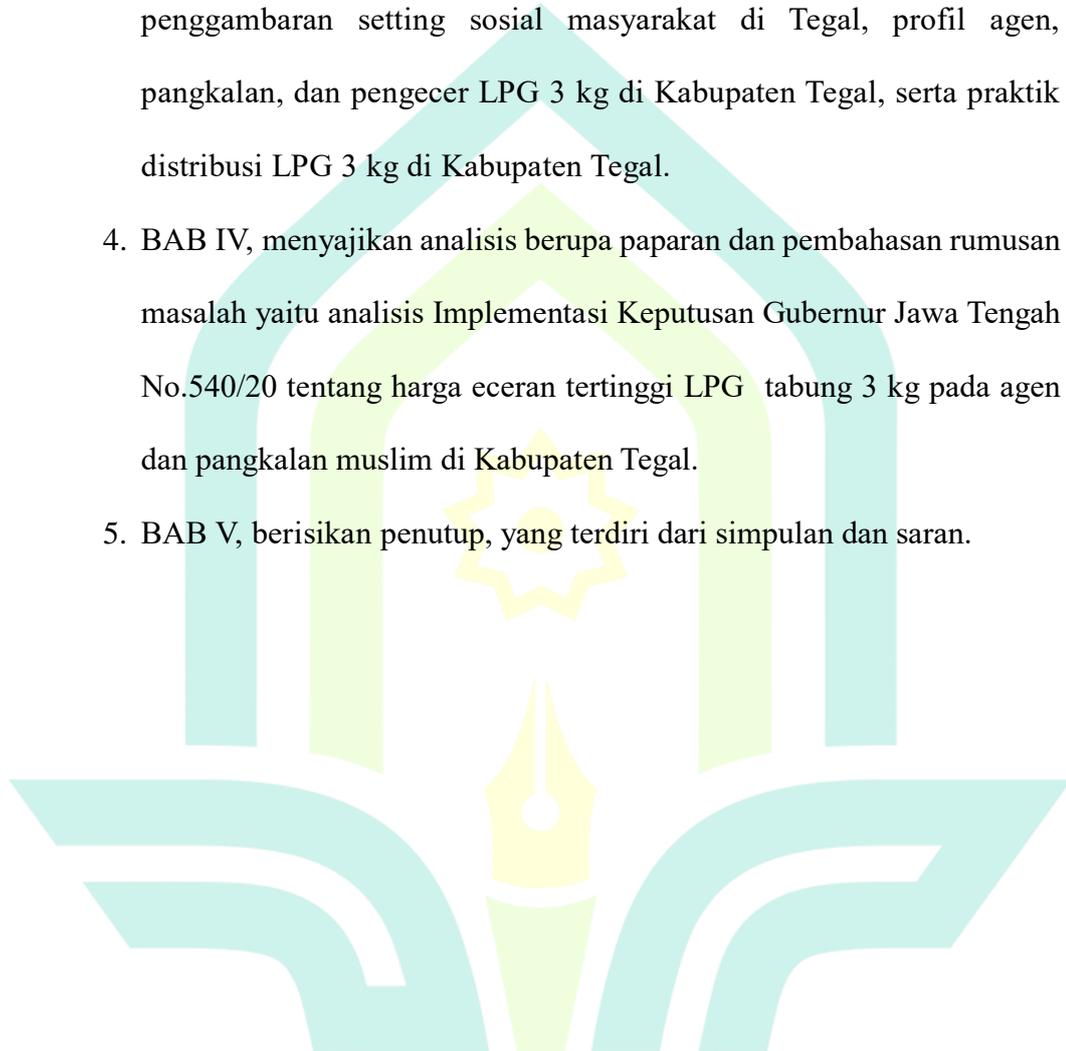
1. BAB I, Pendahuluan mencakup penjelasan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, penelitian yang relevan, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

---

<sup>26</sup> Sugiyono.

<sup>27</sup> Sugiyono.

2. BAB II, berisi teori implementasi kebijakan, penetapan harga eceran tertinggi, surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.540/20 tentang harga eceran tertinggi Gas LPG 3 kg dan penjelasan konsep distribusi gas LPG 3 kg.
3. BAB III, menyajikan hasil penelitian lapangan yang mencakup penggambaran setting sosial masyarakat di Tegal, profil agen, pangkalan, dan pengecer LPG 3 kg di Kabupaten Tegal, serta praktik distribusi LPG 3 kg di Kabupaten Tegal.
4. BAB IV, menyajikan analisis berupa paparan dan pembahasan rumusan masalah yaitu analisis Implementasi Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.540/20 tentang harga eceran tertinggi LPG tabung 3 kg pada agen dan pangkalan muslim di Kabupaten Tegal.
5. BAB V, berisikan penutup, yang terdiri dari simpulan dan saran.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Implementasi Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.540/20 Tahun 2024 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 kg di Kabupaten Tegal belum sepenuhnya berjalan sesuai aturan. Di tingkat agen, penjualan telah sesuai dengan HET, yaitu Rp 15.520 per tabung, dengan pengawasan melalui aplikasi Si Melon, audit tahunan, dan inspeksi mendadak jika terjadi kelangkaan atau pelanggaran harga. Namun, di tingkat pangkalan masih ditemukan pelanggaran, seperti Pangkalan Bu Tini yang menjual LPG seharga Rp 21.000–Rp 22.000 dan Pangkalan Harbas Rp 20.000, sementara sebagian pangkalan lain berusaha menjual sesuai HET, seperti Pangkalan Taruni yang menjual ke warung seharga Rp 17.000 agar tetap sesuai HET. Pengawasan di pangkalan dilakukan melalui aplikasi MAP atau MAP Lite, serta monitoring bulanan oleh agen, tetapi sanksi seperti Surat Peringatan (SP) dan Pemutusan Hubungan Usaha (PHU) belum diterapkan secara tegas.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.540/20 Tahun 2024 tentang Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 Kg di Kabupaten Tegal yaitu kurangnya pengawasan atas distribusi LPG 3 Kg, kurangnya edukasi masyarakat, sumber daya manusia yang belum memadai, dan struktur birokrasi distribusi yang kompleks.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Implementasi Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.540/20 Tahun 2024 tentang Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 Kg di Kabupaten Tegal, peneliti memberikan saran kepada pihak-pihak terkait sebagai berikut.

1. Untuk Pemerintah, disarankan agar dapat meningkatkan pengawasan terhadap distribusi LPG 3 kg, khususnya di tingkat pangkalan dan memperketat penerapan sanksi bagi pelanggar HET serta melakukan sosialisasi yang lebih luas mengenai regulasi HET LPG 3 kg kepada masyarakat agar mereka mengetahui harga yang seharusnya serta dapat melaporkan jika terjadi pelanggaran.
2. Untuk Agen dan Pangkalan, disarankan agar mematuhi peraturan pemerintah mengenai HET LPG 3 kg dengan tidak menaikkan harga jual di luar ketentuan yang telah ditetapkan.
3. Untuk Masyarakat, disarankan agar dapat meningkatkan kesadaran akan hak sebagai konsumen LPG bersubsidi, termasuk mengetahui harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Rifa'I. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta, 2021.
- Andini, Dini. "Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia No.104 Tahun 2007 Pasal 3 Ayat (1) Tentang Pendistribusian Gas Tabung 3 Kg (Studi Di Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal)." UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, 2023.
- Armia, Muhammad Siddiq. *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022.
- Asmawati, Andi. "Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Disiplin Aparatur Sipil Negara Pada Kantor Kelurahan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang." *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan* 8, no. 1 (2020): 8–17. <https://doi.org/10.51817/prj.v8i1.201>.
- Benuf, Kornelius, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono. "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 145–60. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>.
- Effendy, Saladdinwirawan. "Analisis Saluran Distribusi Gas Elpiji 3 Kg Serta Dampaknya Terhadap Harga Pada Tingkat Konsumen Akhir ( Studi Kasus Kota Palembang )." *Sustainable Competitive Advantage-7 (Sca-7) Feb Unsoed* 7, no. September (2017): 40–48. [http://jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/sca-1/article/viewFile/1040/pdf\\_213](http://jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/sca-1/article/viewFile/1040/pdf_213).
- Entjaurau, Jenifer Aprilia, Ismail Sumampow, and Gustaf Undap. "Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Melaksanakan Protokol Kesehatan Covid-19 Di Kecamatan Pineleng." *Jurnal Governance* 1, no. 2 (2021): 1–8.
- Fatmawati, Erma. "Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Peran Birokrasi Dan Partisipasi Masyarakat." *JIEMAN: Journal of Islamic Educational Management* 1, no. 1 (2019): 58–76. <https://doi.org/10.35719/jieman.v1i1.10>.
- Februari, Budi, Gilang Saka Maulana, and Budi Harianto. "Pemikiran Imam Al-Ghazali Mengenai Perolehan Keuntungan Dalam Kegiatan Jual Beli." *Journal Sains Student Research* 2, no. 1 (2024): 310–22.
- Fiddiyaningsih, Avilia. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 541/15 Tahun 2015 Tentang Penetapan Harga Jual LPG Tabung 3 Kg Di Kota Semarang." UIN WaliSongo, 2017.
- Firmansyah, Deri, and Dede. "Teknik Pengambilan Sampel Umum Dalam Metodologi." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH)* 1, no. 2 (2022): 85–114.
- Gubernur Jawa Tengah. *Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 540/20 Tahun 2024 Tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg Pada Titik Serah Sub Penyalur/Pangkalan*, 2024.

- Hajar, Siti, and Nuraini. "Analisis Kepatuhan Pemilik Pangkalan LPG PT Kuta Naga Ga Terhadap HET Yang Telah Ditetapkan Pemerintah Dalam Penjualan Gas Subsidi Aceh Selatan." *Jurnal Serambi Ekonomi Dan Bisnis* 1, no. 2 (2024): 283–94.
- Hendra, and Ali Mahadi Ritonga. "Pandangan Imam Al-Ghazali Terhadap Pengambilan Keuntungan Dalam Kegiatan Jual Beli." *Journal of Management, Economic, and Accounting* 2, no. 2 (2023): 80–85. <https://bnr.bg/post/101787017/bsp-za-balgaria-e-pod-nomer-1-v-buletinata-za-vota-gerb-s-nomer-2-pp-db-s-nomer-12>.
- Idris, Reza Faizal, and Heru Sulistiyantoro. "Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Dalam Transaksi Jual Beli Gas Lpg 3 Kilogram Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa* 1, no. 3 (2022): 227–46.
- Jamiat, Silvia Ningsih, and Sri Sudono Saliro. "Faktor-Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Pengelolaan Parkir Di Kota Sambas." *Irajagaddhita* 1, no. 2 (2023): 78–86. <https://doi.org/10.59996/irajagaddhita.v1i2.275>.
- Kementerian ESDM. *Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan Dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas.*, 2021.
- Latifah. "Implementasi Distribusi Gas Lpg 3 Kg Untuk Masyarakat Miskin Pada Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong." *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 3, no. 5 (2024): 2572–84. <https://doi.org/10.55681/sentri.v3i5.2843>.
- Maulidia, Rizqa. "Analisis Implementasi Peraturan Pemerintah Tentang Pendistribusian, Dan Penetapan Harga Lpg 3 Kg Bagi Distributor LPG 3 Kg Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh)." UIN Arraniry Banda Aceh, 2021.
- Munthe, Mhd Erwin. "Kemaslahatan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dan Pelaku Usaha Melalui Mekanisme Penetapan Harga Oleh Negara." *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah* 9, no. 2 (2018): 217–43.
- Norjanah, Rafika, Ni Made, Musiyani Anjasmari, and Moh Fajar Noorrahman. "Implementasi Kebijakan Distribusi Gas Lpg 3 Kilogram Di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan (Studi Kasus Pada Pangkalan Di Desa Batu Merah Dan Kusambi Hilir)." *Jurnal Kebijakan Publik* 1, no. 4 (2024): 846–57.
- Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, and Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*. Surakarta: Oase Pustaka, 2020.
- Putra, Rakhmad Pribowo Hari, Sarjon Defit, and Sumijan. "Analisis Sistem Antrian Dalam Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Menggunakan Metode Accidental Sampling." *Jurnal Sistim Informasi Dan Teknologi* 4, no. 2 (2022): 70–75. <https://doi.org/10.37034/jsisfotek.v4i2.127>.
- Roring, Andreas Delpiero, Michael S Mantiri, and Marlien T Lopian.

“Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Virus Corona (Covid 19) Di Desa Ongkaw 1 Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan.” *Jurnal Governance* 1, no. 2 (2021): 1–11.

Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Qiara Media, 2021.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Suryani, Fitri, Arif Rahman, and Fatahillah Fatahillah. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Gas Elpiji Bersubsidi Melebihi Harga Eceran Tertinggi.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 6, no. 2 (2023): 122. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.9243>.

Syarifuddin, Sarini, and Muhammad Ikhwan Saputra. “Al-Ghazali Dan Perilaku Pasar: Perpesktif Etika Bisnis Dalam Kitab Ihya Ulum Ad-Din.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (2020): 501. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1312>.

